

**ANALYSIS OF KEY FACTORS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN
DETERMINING THE SUSTAINABILITY OF CULTURAL FESTIVALS IN
INDONESIA**

**ANALISIS FAKTOR KUNCI PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM
MENENTUKAN KEBERLANJUTAN FESTIVAL BUDAYA DI INDONESIA**

Tazkia Qurrota' Aini¹, Bambang Suharto²

Sekolah Pascasarjana, Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Studi Industri
kreatif, Universitas Airlangga^{1,2}

tazkia.qurrota.aini-2024@pasca.unair.ac.id¹, bambang.suharto@vokasi.unair.ac.id²

ABSTRACT

Cultural festivals have evolved into strategic instruments for strengthening local identity and social cohesion. However, their sustainability is often hindered by top-down governance practices and superficial community participation. This study aims to analyze the key factors of community participation that determine the sustainability of cultural festivals in Indonesia through a literature review. It examines various reputable journal articles from both national and international databases. The findings reveal a spectrum of participation outcomes ranging from synergistic empowerment to appropriation marked by conflict and marginalization. A festival's position within this spectrum is shaped by the interaction of four key factor clusters: festival governance, the utilization of social and cultural capital, empowerment mechanisms, and the quality of inter-stakeholder relations. These findings emphasize that the social pillar serves as a fundamental foundation for festival sustainability while also offering practical implications for stakeholders in designing more inclusive and equitable cultural festivals.

Keywords: Sustainable Festivals, Community Participation, Social Sustainability, Community Empowerment, Cultural Appropriation.

ABSTRAK

Festival budaya telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam penguatan identitas lokal dan kohesi sosial. Namun, keberlanjutan festival seringkali terhambat oleh praktik tata kelola yang bersifat *top-down* dan partisipasi komunitas yang semu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kunci partisipasi komunitas yang menentukan keberlanjutan festival budaya di Indonesia melalui sebuah kajian pustaka (*Literature Review*). Penelitian ini menelaah berbagai artikel jurnal bereputasi dari basis data nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebuah spektrum hasil partisipasi yang membentang dari pemberdayaan (*empowerment*) yang sinergis hingga perampasan (*appropriation*) yang ditandai oleh konflik dan marginalisasi. Posisi festival dalam spektrum ini ditentukan oleh interaksi dari empat kluster faktor kunci: tata kelola festival, pemanfaatan modal sosial dan budaya, mekanisme pemberdayaan, dan kualitas relasi antar-stakeholder. Temuan ini menegaskan bahwa pilar sosial merupakan fondasi fundamental bagi keberlanjutan festival, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk merancang festival yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Festival Berkelanjutan, Partisipasi Komunitas, Keberlanjutan Sosial, Pemberdayaan Komunitas, Perampasan Budaya.

PENDAHULUAN

Festival budaya merupakan fenomena global yang tidak terpisahkan dari lanskap budaya, sosial, dan ekonomi. Ia tidak hanya berfungsi sebagai ruang hiburan, tetapi juga sebagai wahana vital untuk pelestarian identitas, penguatan ekonomi lokal, dan pembentukan kohesi sosial (Arcodia & Whitford, 2006; Crespi-Vallbona &

Richards, 2007). Dalam diskursus pembangunan modern, festival kian dipandang sebagai instrumen strategis untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*). Konsep festival berkelanjutan (*sustainable festival*) menekankan pentingnya keseimbangan tiga pilar yakni kelestarian lingkungan, partisipasi sosial, dan perlindungan nilai sosial budaya masyarakat (Robinson et

al., 2006; Mair & Laing, 2012). Dalam praktiknya, banyak festival masih menitikberatkan pada dimensi ekonomi, misalnya dari peningkatan kunjungan wisatawan atau jumlah transaksi selama acara, sementara dimensi sosial seringkali terabaikan (Stevenson, 2016). Padahal, keberhasilan sebuah festival tidak lagi cukup diukur melalui indikator ekonomi saja, melainkan dari kemampuannya untuk menumbuhkan keberlanjutan holistik yang berpihak pada komunitas tuan rumah (Robinson *et al.*, 2006; Mair & Laing, 2012).

Di antara tiga pilar keberlanjutan, pilar sosial budaya semakin diakui sebagai fondasi yang paling menentukan bagi keberlangsungan jangka panjang sebuah festival. Sebuah tinjauan sistematis terhadap 62 artikel akademis mengonfirmasi bahwa partisipasi komunitas adalah salah satu indikator kunci yang paling sering digunakan untuk mengukur keberlanjutan sosial-budaya (Zou *et al.*, 2021). Penelitian kuantitatif oleh Yolal *et al.* (2016) membuktikan bahwa bagi warga lokal, manfaat komunal seperti kebanggaan kolektif dan penguatan citra daerah memiliki dampak positif yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan (*well-being*) mereka, dibandingkan dengan manfaat ekonomi semata. Sebaliknya, dampak negatif festival yang mengganggu kehidupan sosial seperti kemacetan dan keramaian berlebih, terbukti menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini menegaskan bahwa tanpa dukungan sosial yang lahir dari partisipasi lokal, festival akan kehilangan legitimasinya, sekalipun ia berhasil secara komersial. Partisipasi komunitas menjadi kunci utama dalam perencanaan dan pengelolaan festival berkelanjutan. Jepson & Clarke (2011) menekankan bahwa festival dapat menjadi ruang bagi masyarakat lokal untuk membangun

modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan jejaring sosial. Demikian pula, Okazaki (2008) melalui model *community based tourism (CBT)* menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata sangat ditentukan oleh sejauh mana warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pelaksana semata. Studi oleh Nursaid *et al.* (2022) mengenai *Dieng Culture Festival* membuktikan bahwa partisipasi komunitas yang kuat berperan besar dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian tradisi. Partisipasi yang bermakna inilah yang akan membangun modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan jejaring yang memperkuat ketahanan komunitas (Jepson & Clarke, 2011).

Namun, partisipasi komunitas bukanlah konsep yang sederhana. Literatur mengungkap sebuah realitas dualistik yang menjadi inti dari permasalahan penelitian ini. Pada satu sisi, partisipasi yang otentik menghasilkan pemberdayaan (*empowerment*), dimana komunitas memperoleh manfaat ekonomi, peningkatan kapasitas, dan legitimasi budaya. Contoh fenomenal dari model ini adalah *Jember Fashion Carnaval (JFC)* di Indonesia. JFC berhasil memberdayakan komunitasnya dengan memfasilitasi kreativitas warga hingga menjadi ikon budaya sekaligus sumber penghasilan yang berkelanjutan (Ali *et al.*, 2023). Di sisi lain, partisipasi yang bersifat semu (*tokenism*) dan diatur secara top-down berisiko besar berujung pada perampasan (*appropriation*). Kasus *Alter do Chão Film Festival* di Brazil memperlihatkan bagaimana dominasi penyelenggara dari luar dan kegagalan melibatkan komunitas membuat warga lokal merasa terpinggirkan. Akibatnya masyarakat merasa budayanya dieksploitasi yang

berakibat konflik dan perpecahan pada kedua belah pihak (Póvoa, 2023).

Konteks Indonesia memberikan urgensi tersendiri. Sebagai negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, festival telah menjadi tulang punggung ekonomi kreatif dan pariwisata (Rumanti *et al.*, 2025). Namun, sebagian besar festival masih diinisiasi secara *top-down* oleh pemerintah atau korporasi, sehingga rawan jatuh ke dalam model partisipasi semu. Kasus Festival Film Indonesia (FFI) menunjukkan bagaimana tata kelola yang tidak konsisten dan hambatan komunikasi dalam sebuah festival yang dimandatkan pemerintah. Hal ini mengakibatkan festival kehilangan konsistensi identitasnya dengan meminggirkan komunitas kuncinya sendiri, yakni para praktisi film dan audiens publik (Undiana *et al.*, 2025).

Literatur lain juga menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan partisipasi komunitas. Pertama, tata kelola pemerintahan. Anjani (2025) menekankan bahwa model *collaborative governance* yang diterapkan dalam Festival Kampung Cempluk mampu mempertemukan kepentingan masyarakat, pemerintah, seniman, akademisi, dan media, sehingga festival tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai ikon budaya lokal. Selain faktor tata kelola, literatur terbaru menyoroti isu lain yang krusial. Rumanti *et al.* (2025) menekankan pentingnya literasi digital dan komunikasi sebagai prasyarat partisipasi yang inklusif. Novianti *et al.* (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya digital memperkuat keberlanjutan. Sebuah festival yang berkelanjutan harus mampu mengenali dan menghormati "ruang budaya" yang dihidupi oleh warga, baik yang formal

maupun informal (Habib, Hasibuan, & Kurniawan, 2023). Semua studi ini memperlihatkan bahwa faktor partisipasi tidak berdiri tunggal, melainkan dipengaruhi oleh jejaring tata kelola, kapasitas teknologi, transfer pengetahuan antargenerasi, hingga pengakuan ruang budaya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kunci partisipasi komunitas yang menentukan keberlanjutan sosial festival budaya di Indonesia. Meskipun literatur di Indonesia telah banyak membahas dampak ekonomi festival, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam hal analisis sistematis mengenai faktor-faktor kunci yang menentukan kualitas partisipasi komunitas dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial. Secara khusus, penelitian ini berupaya (1) mengidentifikasi kluster faktor partisipasi komunitas yang konsisten dibahas dalam literatur; (2) membedakan bagaimana faktor-faktor tersebut mendorong pemberdayaan (*empowerment*) atau justru perampasan (*appropriation*); dan (3) mensintesis temuan menjadi kerangka analitis yang dapat digunakan dalam pengelolaan festival. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan seperti "faktor kunci apa saja yang secara konsisten membentuk partisipasi komunitas pada festival budaya di Indonesia? atau "bagaimana interaksi antar faktor tersebut memosisikan sebuah festival pada spektrum *empowerment* dan *appropriation*".

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dua arah. Secara teoretis, memperkaya kajian *sustainable cultural festival* dengan menekankan dimensi sosial yang sering terabaikan. Secara praktis, memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi penyelenggara, pemerintah daerah,

dan komunitas agar festival di Indonesia dapat dirancang lebih inklusif, partisipatif, dan benar-benar berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) untuk merangkum bukti paling relevan mengenai partisipasi komunitas pada festival budaya berkelanjutan. Penelitian ini berada pada ranah akademik dengan objek kajian berupa artikel-artikel ilmiah yang membahas partisipasi komunitas dalam festival budaya berkelanjutan, baik pada konteks internasional maupun Indonesia. Subjek penelitian berupa publikasi ilmiah yang relevan, termasuk artikel jurnal bereputasi internasional. Pencarian dilakukan pada Scopus, DOAJ, *Google Scholar*, dan Portal Garuda. Kata kunci menggabungkan istilah festival (*festival, community event, carnival/parade*) dengan dimensi sosial-budaya (*social sustainability, social capital, empowerment, governance, stakeholder, community/resident/ local*). Seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi artikel terbit tahun 2013–2025, beberapa prosiding dipertimbangkan bila memiliki konteks yang relevan.

Artikel diikutkan bila: (1) membahas festival/acara berbasis komunitas; (2) menilai aspek sosial-budaya seperti partisipasi/pemberdayaan, modal sosial/PSOC, tata kelola dan relasi pemangku kepentingan, inklusi/keadilan, otentisitas/transmisi budaya; dan (3) merupakan studi empiris (kualitatif/kuantitatif/mixed methods). Artikel dikecualikan bila: (1) bukan topik festival; (2) berfokus pada pemasaran/CSR murni tanpa kaitan pemberdayaan/relasi komunitas; (3)

non-empiris atau metodenya tidak jelas; atau (4) duplikasi.

Dari setiap artikel yang lolos dicatat konteks/negara dan sektor budaya, metode & desain, ukuran sampel/partisipan, sumber data/teknik analisis, indikator sosial-budaya (mis. PSOC/modal sosial, pemberdayaan, tata kelola/relasi, inklusi/keadilan, otentisitas/ruang budaya), serta temuan kunci. Sintesis dilakukan melalui analisis tematik-naratif dengan langkah membaca, memberi kode, mengelompokkan, meninjau, dan melaporkan tema (Braun & Clarke, 2006). Tema utama yang muncul meliputi tata kelola & salience pemangku kepentingan, modal sosial/PSOC, mekanisme pemberdayaan, inklusi & keadilan sosial, otentisitas & perubahan, ruang budaya & keterikatan tempat, literasi/komunikasi digital, serta peran pemuda & jejaring. Kajian menggunakan publikasi yang telah tersedia secara terbuka sehingga tidak memerlukan persetujuan etik. Hasil bersifat sintesis naratif; generalisasi terutama berlaku untuk dimensi sosial-budaya dan tidak menilai efektivitas ekonomi atau lingkungan secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis tematik terhadap literatur yang relevan menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial budaya sebuah festival membentuk spektrum hasil partisipasi yang membentang, yakni pemberdayaan (*empowerment*) yang ditandai dengan sinergi, *ownership, social license*; hingga perampasan (*appropriation*) seperti eksploitasi, konflik, dan delegitimasi. Posisi sebuah festival dalam spektrum ini ditentukan oleh interaksi kompleks dari empat kluster faktor kunci yang saling terkait: (1) tata kelola dan struktur kekuasaan;

(2) pemanfaatan modal sosial dan budaya; (3) mekanisme dan hasil pemberdayaan; serta (4) kualitas relasi antar-stakeholder.

(1) Tata Kelola & Struktur Kekuasaan

Studi menunjukkan perbedaan nyata antara desain tata kelola yang kolaboratif dan struktur yang bersifat *top-down*. Keterlibatan komunitas secara penuh sejak tahap perencanaan terbukti meningkatkan legitimasi, dukungan publik, dan keberlanjutan festival dalam jangka panjang. Penggunaan peta salience pemangku kepentingan (berdasarkan kekuatan, legitimasi, dan urgensi) membantu penyelenggara memprioritaskan pelibatan yang lebih adil dan merata (Adongo & Kim, 2018). Pada tingkat manajerial, kerangka kerja seperti *Sustainable Festival Management Model* menempatkan komunitas sebagai pemangku kepentingan inti di sepanjang siklus hidup festival, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Duran, Hamarat, & Özkul, 2014). Sebaliknya, proses pengambilan keputusan yang terpusat dan eksklusif cenderung menurunkan rasa memiliki komunitas dan memperbesar risiko munculnya resistensi sosial, terutama ketika komunikasi yang dibangun bersifat satu arah (Mair & Duffy, 2015).

(2) Modal Sosial & Budaya

Festival berfungsi secara efektif menjadi wadah untuk memperkuat modal sosial, seperti kepercayaan, jejaring, dan kohesi sosial, melalui interaksi yang berulang dan bermakna antarwarga (Jepson & Clarke, 2011). Aspek otentisitas dan persepsi keterikatan pada tempat (*placeness*) juga memainkan peran krusial dalam membentuk dukungan warga terhadap adaptasi dan evolusi festival. Warga cenderung menakar nilai pelestarian

budaya dan eksklusivitas terhadap potensi manfaat ekonomi ketika menerima perubahan atau inovasi dalam festival (Choi, Imon, & Couto, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa distribusi manfaat budaya dapat menjadi timpang jika akses untuk berpartisipasi dan representasi komunitas tidak dikelola secara inklusif sejak awal (Mair & Duffy, 2015).

(3) Mekanisme dan Hasil Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam konteks festival tampak sebagai peningkatan kapasitas individu dan kolektif, yang mencakup penguasaan keterampilan baru (termasuk literasi digital), perluasan akses terhadap hak dan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan psikososial (seperti kebanggaan komunal dan penguatan identitas). Bukti lintas-studi menunjukkan bahwa manfaat komunal (rasa bangga, pengakuan identitas) seringkali lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan warga secara keseluruhan dibandingkan manfaat ekonomi semata (Yolal *et al.*, 2016). Dalam praktik kontemporer, kapasitas komunikasi dan penguasaan teknologi digital turut memperkuat tingkat pelibatan dan efektivitas transmisi budaya antar-generasi (Novianti *et al.*, 2025; Rumanti *et al.*, 2025). Selain itu, metode pemetaan ruang budaya partisipatif terbukti memberikan suara kepada warga untuk menentukan ruang-ruang inti, taktis, dan bahkan berpotensi konflik yang perlu dilindungi dalam tata kelola festival (Habib, Hasibuan, & Kurniawan, 2023).

(4) Kualitas Relasi Antar-Pemangku Kepentingan

Keberlanjutan sebuah festival sangat bergantung pada kualitas hubungan yang didasari kepercayaan timbal balik dan pertukaran yang dianggap adil di antara berbagai pihak: komunitas, penyelenggara, pemerintah,

pelaku usaha, media, dan mitra pengetahuan (Andersson & Getz, 2008; Adongo & Kim, 2018). Relasi yang sehat memungkinkan festival berfungsi sebagai platform kolaborasi untuk memecahkan masalah bersama, seperti merancang promosi yang etis, memastikan akses yang setara, dan mengelola dampak negatif. Sebaliknya, relasi yang timpang seperti komunikasi fragmentaris atau pengambilan keputusan yang tertutup, berasosiasi erat dengan delegitimasi sosial dan dukungan publik yang rapuh (Mair & Duffy, 2015). Dalam konteks Indonesia, pembelajaran dari dinamika identitas kelembagaan di berbagai festival menunjukkan pentingnya penyusunan SOP komunikasi dan definisi peran yang jelas untuk mencegah erosi legitimasi (Undianäi, Abdullah, Agustini, & Wirakusumah, 2025).

Secara keseluruhan, temuan lintas klaster ini menegaskan bahwa tata kelola yang inklusif, penguatan modal sosial-budaya, dan mekanisme pemberdayaan yang nyata (meliputi kapasitas, hak, dan akses) merupakan prasyarat fundamental untuk menggeser posisi festival ke sisi pemberdayaan pada spektrum keberlanjutan. Sebaliknya, proses yang tertutup, distribusi manfaat yang timpang, dan relasi yang tidak setara akan meningkatkan risiko terjadinya *appropriation* dan delegitimasi.

Pembahasan

Analisis kajian pustaka menegaskan bahwa keberlanjutan sebuah festival budaya secara fundamental ditentukan oleh kualitas partisipasi komunitas atau masyarakat lokal. Temuan dari berbagai studi secara konsisten menunjukkan adanya sebuah spektrum partisipasi yang membentang dari pemberdayaan (*empowerment*) hingga perampasan (*appropriation*).

Spektrum ini berfungsi sebagai kerangka analitis utama untuk memahami mengapa beberapa festival berhasil menciptakan sinergi yang berkelanjutan, sementara yang lain justru memicu konflik dan kehilangan legitimasi sosial.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat argumen mengenai pilar sosial dalam festival keberlanjutan, dimana dukungan komunitas menjadi fondasi yang lebih krusial daripada sekadar kesuksesan ekonomi jangka pendek (Zou *et al.*, 2021)). Dinamika kekuasaan menjadi variabel penentu dalam spektrum ini. Model Pemberdayaan, sebagaimana terlihat pada *Jember Fashion Carnaval* (Ali *et al.*, 2023), beroperasi pada tingkat partisipasi penuh, di mana komunitas memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan tingkatan tertinggi dalam *Ladder of Participation* yang dikemukakan Arnstein (1969). Sebaliknya, Model Perampasan, seperti pada kasus Alter do Chão (Póvoa, 2023) dan Festival Film Indonesia (Undiana *et al.*, 2025), menunjukkan praktik partisipasi semu (*tokenism*) yang hanya bersifat formalitas, menempatkan komunitas dan masyarakat tanpa kekuasaan yang berarti.

Secara praktis, pergeseran dari model perampasan menuju pemberdayaan menuntut adanya intervensi strategis pada beberapa faktor kunci. Pertama, tata kelola harus bergeser dari model *top-down* menuju kolaborasi yang terstruktur, dengan mengadopsi "ruang budaya" yang menjadi bagian hidup masyarakat (Duran, Hamarat, & Özkul, 2014; Habib, Hasibuan, & Kurniawan, 2023). Kedua, mekanisme pemberdayaan harus melibatkan komunitas secara strategis dan teknis sehingga secara aktif dapat meningkatkan kapasitas komunitas.

Literasi digital juga kini menjadi kompetensi krusial di era modern dengan melibatkan pemuda sebagai agen perubahan (Rumanti *et al.*, 2025; Novianti *et al.*, 2025). Ketiga, hubungan antar-stakeholder harus dibangun di atas prinsip keadilan dan transparansi, sekaligus berfungsi sebagai platform Inovasi Sosial Terbuka (*Open Social Innovation*) untuk memecahkan masalah bersama dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Das, Mandal, Nedungadi, & Raman, 2025).

Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa keberlanjutan festival budaya tidak dapat dicapai tanpa menempatkan komunitas sebagai aktor sentral dalam tata kelola, pemberdayaan, dan kolaborasi lintas-stakeholder. Spektrum pemberdayaan dan perampasan bukan hanya kerangka analitis, tetapi juga panduan normatif bagi penyelenggara dan pembuat kebijakan untuk menghindari praktik partisipasi semu dan memastikan bahwa festival benar-benar berfungsi sebagai sarana penguatan identitas, kesejahteraan, dan solidaritas sosial.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan festival budaya secara fundamental ditentukan oleh kualitas partisipasi komunitas. Hasil kajian pustaka menunjukkan adanya spektrum partisipasi yang bergerak dari pemberdayaan hingga perampasan. Model pemberdayaan ditandai oleh tata kelola kolaboratif, distribusi manfaat yang adil, serta peningkatan kapasitas komunitas yang melibatkan pemuda dan pemanfaatan literasi digital. Sebaliknya, model perampasan ditandai oleh dominasi pihak eksternal, marginalisasi komunitas, serta praktik partisipasi semu yang memicu konflik dan menurunkan legitimasi sosial festival.

Temuan ini menegaskan bahwa pilar sosial harus menjadi dasar utama dalam manajemen festival berkelanjutan, melampaui sekadar capaian ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, penyelenggara festival, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain perlu mengadopsi pendekatan tata kelola kolaboratif, menjadikan komunitas sebagai mitra pengambil keputusan, serta memanfaatkan festival sebagai platform inovasi sosial yang berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Bagi penelitian selanjutnya, terdapat ruang untuk memperluas analisis melalui studi longitudinal yang menelusuri evolusi partisipasi komunitas dari waktu ke waktu, serta penelitian empiris berbasis lapangan yang mengeksplorasi praktik kolaborasi dan resolusi konflik antar-stakeholder secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi terciptanya festival budaya di Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adongo, R., Kim, S. S., & Kim, I. (2018). Festival stakeholders' perceptions of their legitimacy, power and urgency: A sustainable festival framework. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(2), 218–236.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1514042>
- Ali, M., Suharto, B., Maulidy, R. A., Lestari, N. P., & Laksmi, D. A. (2023). Jember Fashion Carnival: A model of sustainable cultural festival through community participation. *Journal of Cultural Studies*, 15(1), 45–62.

- <https://doi.org/10.33153/brikolase.v15i2.5513>
- Andersson, T. D., & Getz, D. (2008). Stakeholder management strategies of festivals. *Journal of Convention & Event Tourism*, 9(3), 199–220. <https://doi.org/10.1080/15470140802323801>
- Anjani, F. (2025). Collaborative governance in cultural festivals: A case study of Kampung Cempluk. *Indonesian Journal of Cultural Policy*, 12(2), 77–95. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/434>
- Arcodia, C., & Whitford, M. (2006). Festival attendance and the development of social capital. *Journal of Convention & Event Tourism*, 8(2), 1–18. https://doi.org/10.1300/J452v08n02_01
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Crespi-Vallbona, M., & Richards, G. (2007). The meaning of cultural festivals. *Event Management*, 11(1–2), 33–41. <https://doi.org/10.3727/152599508783943262>
- Das, P., Mandal, S., Nedungadi, P., & Raman, R. (2025). Unveiling sustainable tourism themes with machine learning based topic modeling. *Discover Sustainability*, 6, 280. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01065-4>
- Duran, E., Hamarat, B., & Özkul, E. (2014). A sustainable festival management model: The case of *International Troia Festival*. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 8(2), 173–193. <https://doi.org/10.1108/IJCTHR-04-2013-0017>
- Habib, M. H., Hasibuan, H. S., & Kurniawan, K. R. (2023). Cultural space as sustainability indicator for development planning (Case study in Jakarta coastal area). *Sustainability*, 15(17), 13125. <https://doi.org/10.3390/su151713125>
- Jepson, A. S., & Clarke, A. (2011). Power and hegemony within a community festival. *International Journal of Event and Festival Management*, 2(1), 7–19. <https://doi.org/10.1108/1758295111116588>
- Mair, J. & Laing, J. (2012). The greening of music festivals: Motivations, barriers and outcomes. Applying the Mair and Jago model. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(5), 683–700. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.636819>
- Novianti, W., Noegroho, A., Yamin, M., Lotulung, L. J. H., & Desmiwati, D. (2025). Comparative study of the utilization of social media by indigenous religious organizations in Indonesia. *Journal of Intercultural Communication*, 25(2), 30–45. <https://doi.org/10.36923/jicc.v25i2.1032>
- Nursaid, D., Muhadli, R. A., & Zurinani, S. (2022). Ganenan,

- Pawon, dan Dieng Culture Festival: Media Interaksi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pariwisata Dieng. SBN: *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 6(2), 123-144.
<http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2022.006.02.05>
- Póvoa, R. (2023). Alter do Chão Film Festival and the politics of cultural appropriation in Brazil. *Cultural Studies Review*, 29(2), 57–75.
- Robinson, Picard. (2006). Festivals, tourism and social change: Remaking worlds.
- Rumanti, A. A., Daryanto, Y., Amelia, M., Rizaldi, A. S., Zulkarnain, I., & Andrawina, L. (2025). The role of organizational and stakeholder factors in strengthening digital literacy and communication for edu-tourism. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11, 100618.
<https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100618>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stevenson, N. (2016). Local festivals, social capital and sustainable destination development: Experiences in East London. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(7), 990–1006.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2015.1128943>
- Undianaï, N. N., Abdullah, A., Agustini, H., & Wirakusumah, T. K. (2025). *Identity of the National Film Festival in Indonesia*. *Revista Guillermo de Ockham*, 23(1), 157–173.
<https://doi.org/10.21500/22563202.7068>
- Van Niekerk, M. (2016). Applicability and usefulness of the stakeholder strategy matrix for festival management. *Event Management*, 20(2), 165–179.
<https://doi.org/10.3727/152599516X14610017108666>
- Wilks, L., & Quinn, B. (2016). Performing community: The place of music festivals in local and regional communities. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 26(1), 10–23.
<https://doi.org/10.1002/casp.2224>
- Yolal, M., Gursoy, D., Uysal, M., Kim, H., & Karacaoglu, S. (2016). Impacts of festivals and events on residents' well-being. *Event Management*, 20(1), 1–21.
<https://doi.org/10.3727/152599516X14538326025039>
- Zou, Yongguang & Meng, Fang & Bi, Jian & Zhang, Qing. (2021). Evaluating sustainability of cultural festival tourism: From the perspective of ecological niche. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 48, 191-199.
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.06.009>